



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIMON FAHMI OBOS
2. Jabatan : ANALIS INDUSTRI
3. NHK : 804809

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 438 m2/120 m2 di KAB / KOTA MURUNG RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **110.000.000**

1. MOTOR, HONDA ACB2J22B03 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V RE1 2WD 2.0 MT / JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **3.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **70.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **933.500.000**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **933.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.